

TAJUK RENCANA

Percepat Distribusi Bansos

MESKI sosialisasi PPKM darurat sudah dilakukan secara masif, masih saja ada sebagian masyarakat yang belum paham, atau bahkan tak mau paham. Akibatnya, pelanggaran masih terjadi di sejumlah wilayah. Kita berharap tak ada lagi toleransi bagi pelanggar PPKM darurat. Artinya, semua pelanggar harus dikenai sanksi atau tindakan tegas, sehingga menimbulkan efek jera.

Kita patut mengapresiasi langkah Pemkab Sukoharjo Jateng yang langsung bertindak tegas menyegel rumah makan yang terbukti melanggar PPKM darurat, yakni melayani pembeli makan di tempat. Selain menyegel tempat usaha selama dua hari, Satpol PP setempat langsung mengangkut kursi pedagang. Tak hanya itu pedagang yang melanggar PPKM darurat juga dikenai denda Rp 250 ribu sesuai instruksi bupati setempat.

Hemat kita, cara-cara yang dilakukan Pemkab Sukoharjo sangat efektif untuk menekan pelanggaran sehingga bisa menjadi contoh daerah lain. Sejauh ini kita belum melihat di DIY petugas bertindak setegas itu, apalagi mengenakan denda dan mengangkut kursi pedagang. Kita masih sebatas menggunakan pendekatan persuasif, sehingga acap diabaikan. Kiranya, di masa darurat ini tidak ada pilihan lain kecuali harus bertindak tegas agar pelanggaran tidak terulang.

Sekilas cara tersebut nampak terlalu kejam, apalagi sampai harus mengenakan sanksi denda. Tapi bukankah lebih kejam membiarkan orang terpapar Covid-19 gara-gara ada pedagang yang melanggar PPKM darurat? Pada awalnya, sanksi ini mungkin dinilai terlalu keras, namun kita yakin hasilnya bisa dirasakan. Selanjutnya masyarakat, terutama pedagang, akan menjadi

terbiasa menaati prokes. Dampak positifnya, angka kasus Covid-19 akan menurun.

Efektivitas PPKM darurat memang baru bisa dilihat dua atau tiga pekan setelah 20 Juli 2021. Karena itu sebelum jangka waktu itu berakhir, pemerintah daerah harus mengupayakan agar masyarakat taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam PPKM darurat. Bukan saatnya untuk memperdebatkan isi aturan, tapi kini saatnya untuk melaksanakan, baik suka maupun tidak. Sebab, aturan itu dimaksudkan untuk penyelamatan masyarakat agar segera terbebas dari pandemi Covid-19.

Selama masa PPKM darurat ini, kita juga mendorong instansi terkait untuk segera menjalankan instruksi Presiden agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam minggu ini (KR 6/7). Sebab, masyarakat yang terdampak PPKM darurat sangat membutuhkan bantuan yang bersifat langsung dari pemerintah.

Terkait hal itu kita mengingatkan agar setiap bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat harus jelas laporan pertanggungjawabannya. Kita tak ingin kasus korupsi bansos terulang. Janganlah ada yang memanfaatkan kesengsaraan rakyat guna meraih keuntungan pribadi.

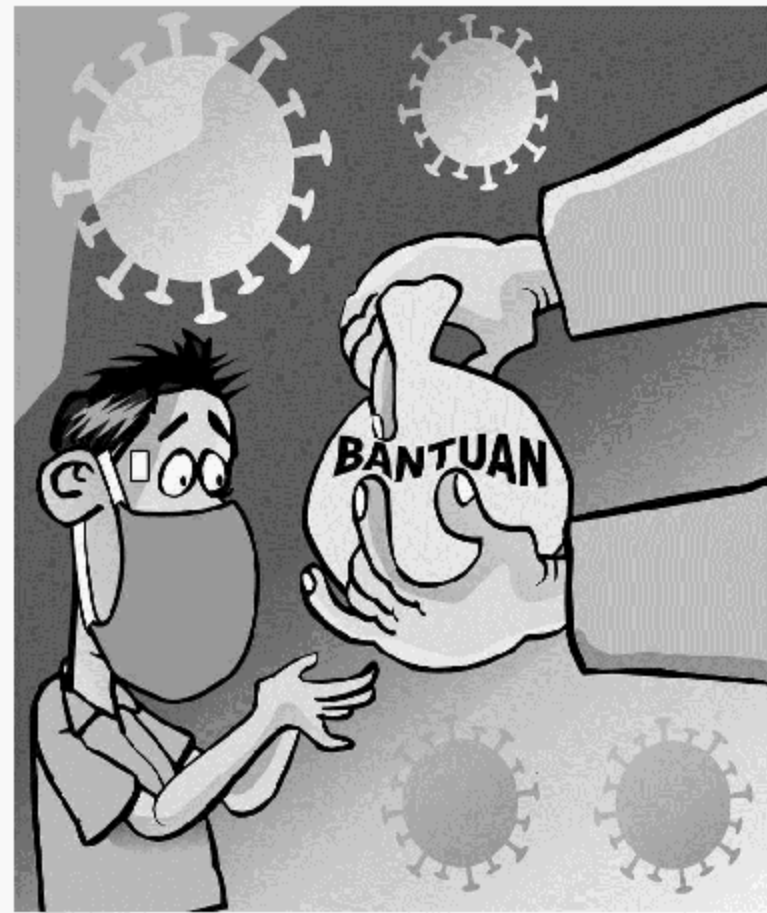
Mengawal distribusi bansos tak kalah pentingnya dengan pemberian bansos itu sendiri. Pun pemberian bansos jangan sampai salah sasaran. Validasi data penerima bantuan harus terus dilakukan secara periodik. Sebab, data bisa berubah dalam waktu relatif cepat. Mereka yang awalnya masuk kategori mampu secara ekonomi, bisa berubah menjadi tidak mampu akibat pandemi. Kita menyarankan agar setiap pendataan warga melibatkan pengurus RT/RW, karena merekalah yang paling tahu kondisiarganya. □

Solidaritas Masyarakat Bukan Panacea

Saqib Fardan Ahmada

tinya justru untuk menutupi kekurangan atau melengkapi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Memang benar bahwa aksi solidaritas yang dilakukan dapat menjadi 'pelengkap' bagi negara dalam mengatasi masa krisis. Namun, sudah sepatutnya pemerintah jangan hanya 'mensyukuri' dan sampai terlenu akan kewajibannya.



KR-JOKO SANTOSO

Bagaimana pun, gerakan solidaritas masyarakat bukanlah panacea atau obat mujarab atas masalah ini. Pemerintah tidak bisa menggantungkan masalah ini sepenuhnya terhadap masyarakat.

Solidaritas masyarakat, meski dapat menjadi alternatif yang dapat memberikan bantuan secara cepat, namun ia tetap merupakan bentuk yang rapuh. Kerapuhan ini setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, dari aspek finansial: gerakan masyarakat umumnya mengandalkan skema pembiayaan yang tidak pasti seperti dari donasi. Sehingga sulit untuk memastikan kondisi finansial gerakan terus terjaga.

Asas Kerelawanan

Kedua, soal aspek sumber daya manu-

dasar, solidaritas masyarakat seringkali didasari dengan dasar kerelawanan sehingga tiap orang bisa masuk dan keluar tanpa ikatan formal. Selain itu, para individu yang tergabung dalam gerakan juga belum tentu dalam kondisi aman. Para individu yang ikut dalam aksi solidaritas terkadang juga rentan dan memerlukan bantuan. Maka dari itu, solidaritas masyarakat merupakan bentuk yang tidak permanen dan mudah berubah. Sehingga ironis ketika masyarakat sudah rentan didorong untuk terus melakukan aksi solidaritas atas nama

Kabar terbaru, dilansir dari *muhammadiyah.or.id* (30/6) gerakan masyarakat seperti Forum PRB, MCC, NU, Jaringan Gusdurian, dan SONJO secara resmi telah mengumumkan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi menjadi relawan di masa pandemi ini. Mereka telah mencapai pada batasnya sebagai relawan yang 'bertugas tanpa SK'.

Untuk itu, jangan sampai peran 'pelengkap' ini justru tidak diiringi peran 'utama'. Pandemi telah berjalan lebih dari satu tahun. Terus mengadakan keswadayaan masyarakat justru akan menegasikan peran pemerintah itu sendiri. Dengan kebijakan jaring pengaman sosial yang efektif, maka pemerintah dapat menjadi pemeran utama dalam menyelamatkan masyarakat di masa sulit ini.

*) **Saqib Fardan Ahmada**, Staf Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Berkaca dari Krisis Oksigen

Aris Suryanto

KRISIS oksigen memunculkan kabar buruk karena belasan pasien meninggal di RSUD Dr Sardjito Yogya. Meski kekurangan oksigen tidak hanya terjadi di RSUD Dr Sardjito saja, tetapi juga di hampir semua rumah sakit di pelbagai kota. Lonjakan kasus positif Covid-19 mengakibatkan kebutuhan oksigen di DIY melonjak tinggi menjadi 5 kali lipat dari kondisi normal (KR, 57). Krisis yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila fasilitas pelayanan kesehatan dari awal memilih sumber oksigen secara mandiri berdasarkan perhitungan kapasitas dan pasokan oksigen yang dibutuhkan.

World Health Organization (WHO) telah mengingatkan pentingnya pasokan oksigen akibat terjadinya pandemi. Hampir semua negara akan mengalami lonjakan pasokan oksigen. Data dari China memperlihatkan bahwa meskipun mayoritas pasien dengan Covid-19 mempunyai gejala sakit ringan (40%) atau sakit sedang (40%). Namun ada sekitar 15% yang mengalami sakit berat dan membutuhkan terapi oksigen, dan 5% akan mengalami kondisi kritis sehingga memerlukan perawatan di ICU dan akan memerlukan perawatan menggunakan ventilator. Untuk alasan tersebut maka semua fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat pasien Covid-19 harus memberikan terapi oksigen yang cukup dan sesuai standard.

Terapi oksigen, berdasarkan Permenkes nomor 4 tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah bagian dari tindakan medis terapeutik, dengan kadar Oksigen (O2) Konsentrat lebih dari 90%. Terapi oksigen direkomendasikan untuk semua kasus Covid-19 yang sakit berat maupun kritis.

Sumber Oksigen

Lonjakan kasus positif Covid-19

demikian cepat. Untuk perawatan Covid-19, dibutuhkan alat bantu pernapasan. Artinya, kebutuhan oksigen menjadi sangat penting disaat seperti ini. Hampir semua fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan tabung gas oksigen atau liquid oksigen sebagai sumber oksigen. Maka berebut pasokan dari produsen oksigen pun terjadi, meski oksigen industri sudah dialihkan untuk oksigen medis. Namun karena kapasitas maksimal produksi oksigen sudah tercapai dan khawatir kebutuhan kian tinggi, pemerintah mengambil solusi akan melakukan impor oksigen.

Berkaca dari krisis oksigen, saatnya fasilitas pelayanan kesehatan memikirkan memiliki sumber oksigen secara mandiri. Fasilitas yang dapat digunakan sebagai sumber oksigen utama atau *backup* dengan mempertimbangkan perkiraan total kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk perawatan pasien yang dihitung berdasarkan aliran oksigen yang dibutuhkan setiap pasien menurut kategori keparahan penyakitnya. Salah satu sumber oksigen secara mandiri adalah Oksigen Generator.

Oksigen Generator adalah mesin penghasil oksigen yang menarik udara bebas dari lingkungan sekitar dan memisahkan kandungan nitrogen yang ada sehingga menghasilkan oksigen terkonsentrasi sesuai standard medis yaitu lebih dari 90%. Oksigen yang dihasilkan digunakan untuk memberikan layanan pasien

melalui sistem jaringan oksigen sentral.

Memproduksi Oksigen

Mesin ini juga dapat mengisi ke tabung gas oksigen lainnya sebagai cadangan oksigen atau untuk kebutuhan layanan lain yang menggunakan tabung oksigen. Dengan memproduksi oksigen di lokasi fasilitas pelayanan kesehatan, dapat menjamin ketersediaan oksigen akan terus ada pada saat dibutuhkan oleh pasien.

Saat ini ada 2 rumah sakit rujukan pasien Covid-19, yaitu RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan RSKIA Bandung yang sejak tahun 2015 telah beralih menggunakan oksigen generator. Dengan waktu operasi mesin selama 24 jam, kedua rumah sakit ini dapat secara mandiri memproduksi kebutuhan gas oksigen untuk pelayanan pasien.

*) **Aris Suryanto SSiTKes**, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

Pojok KR

Seluruh destinasi wisata di DIY tutup sementara.

-- **Harus berkorban agar pandemi sirna.**

Pemda DIY pastikan jaga pasokan bahan pokok.

-- **Tak hanya pasokan, harga juga terjangkau.**

Pemerintah lakukan refocusing APBN.

-- **Demi penyelamatan rakyat.**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Musbahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Susiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiafi, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkryk@yahoo.com, iklankrkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%